

Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor Timur, Filipina dan Papua New Guinea

Editor
**Irfan Abubakar
Chaider S. Bamualim**

Penerjemah
Tim Pusat Bahasa dan Budaya

Transisi Politik dan Konflik Kekerasan:

Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia,
Timor Timur, Filipina dan Papua New Guinea

Editor: Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim
Penerjemah: Tim Pusat Bahasa dan Budaya (PBB)
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Cetakan I, Januari 2005

Diterbitkan oleh
Pusat Bahasa dan Budaya (PBB)
Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Ciputat
Jakarta 15419 Telp. 021-7445173, 7493727
Fax. 021-7445173

dan

European Centre for Conflict Prevention (ECCP)
Korte Elisabethstraat 6 PO Box 14069
3508 SC Utrecht The Netherlands
tel: +31 30 2427776
fax: +31 30 236 9268

Judul Asli:

*Searching for Peace in Asia Pacific: An Overview
of Conflict Prevention and Peacebuilding Activities*
Penerbit: Lynne Rienner Publishers, 2003

Lisensi diberikan oleh Lynne Rienner Publishers
1800 30th street, Suite 314 Boulder
Colorado 80301

Hak terjemahan bahasa Indonesia
pada Pusat Bahasa dan Budaya
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Pelaksana: Sri Hidayati
Desain Kulit Muka: Jhoni Hadi
Lay-out: Abdullah Sajad

ISBN 979-3531-11-8

1. Konflik internasional. I. Abubakar,
Irfan II. Bamualim, Chaider S.
III. Universitas Islam Negeri (Syarif
Hidayatullah). Pusat Bahasa dan Budaya

Daftar Isi

Daftar Isi - iii

Kata Pengantar

H. Murni Djamal - v

Pendahuluan

Editor - ix

Bagian I

Penciptaan Perdamaian: Studi Kasus Indonesia, Timor Timur, Filipina dan Papua New Guinea

Indonesia, Transisi Politik dan Kekerasan Komunal

Harold Crouch - 3

Masyarakat Madani: Bagian yang Hilang dari Penciptaan Perdamaian di Aceh

Aguswandi - 25

Kalimantan: Kesatuan atau Keragaman?

John Bamba - 53

Tantangan Perdamaian di Maluku

Samsu Rizal Panggabean - 79

Papua Barat: Menciptakan Perdamaian dengan Cara Memahami Konflik

Yohanis G. Bonay dan Jane McGrory - 113

Peranan Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Konflik dan Penciptaan Perdamaian di Timor Timur

Helder Da Costa - 151

Mindanao: Hambatan dan Prospek menuju Perdamaian Berkelanjutan

Rufa Cagoco-Guiam - 185

Perempuan, Rekonsiliasi dan Adat: Kisah Sukses Penciptaan Perdamaian Pasca-konflik di Bougainville

Volker Böge dan Lorraine Garasu - 221

Bagian II

Jaringan LSM untuk Perdamaian dan HAM

Indonesia - 249

Timor Timur - 315

Filipina - 327

Papua New Guinea - 351

Penulis & Editor - 357

Index - 361

Index Lembaga - 370

Profil PBB - 374

Kata Pengantar

Terdapat beberapa hal yang hendaknya diperhatikan dalam upaya meningkatkan *capacity building* di bidang penciptaan perdamaian (*peace-building*) dan pencegahan terjadinya konflik (*conflict prevention*) kekerasan yang seringkali terjadi dalam masyarakat yang heterogen dengan model relasi sosial yang kompleks. Hal tersebut diantaranya: *Pertama*, pengetahuan yang benar dan utuh mengenai motif dan sifat dari sebuah peristiwa konflik. Pengetahuan yang baik akan hal ini akan dapat membantu kita mengkonstruksi kerangka teoritik yang memadai dalam rangka perumusan resolusi konflik secara benar. *Kedua*, studi kasus secara kritis dan objektif atas pengalaman-pengalaman konflik kekerasan terdahulu di berbagai wilayah, di dalam maupun luar negeri. Pendekatan semacam ini, selain menjamin tingkat objektivitas yang tinggi, ia juga dapat menjelaskan konteks tertentu serta mengandung nilai komparatif yang bermanfaat.

Menurut hemat kami, strategi *peace-building* dan *conflict resolution* hendaknya dirancang dan dirumuskan atas dasar pendekatan objektif-kontekstual tersebut dan diperkaya dengan kerangka teoritik/metodologis yang memadai. Dengan demikian setiap inisiatif dan rencana aksi bagi penciptaan perdamaian dan resolusi konflik

diharapkan dapat membuahkan hasil yang optimal.

Pusat Bahasa dan Budaya (Center for Languages and Cultures) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mulai menaruh perhatian pada persoalan ini sejak tahun 2000, tepatnya setelah meletusnya konflik komunal di Maluku dan Kalimantan yang menelan ribuan korban jiwa dan harta benda yang tak ternilai harganya. Lebih dari itu, kekerasan komunal tersebut juga meruntuhkan sendi-sendi relasi sosial yang telah lama dikokohkan dalam tradisi dan cara hidup masyarakat setempat. *Pela gandong*, misalnya, yang telah terlembaga dalam adat dan *legitimate* secara kultural, tak mampu dipertahankan. Realitas yang tragis itu membuat Pusat Bahasa dan Budaya—sebagai pusat riset dan kajian sosial budaya—terpanggil untuk mengkaji persoalan tersebut dengan tujuan merumuskan strategi *conflict resolution* dan *peace-building* yang tepat.

Bekerjasama dengan mitra lokal dan internasional, lembaga ini menyelenggarakan seminar internasional tentang *Ethno-religious Conflicts in Indonesia Today (2001)* dan *Workshop on Conflict Resolution and Module Development (2002)*. Selain berhasil mengidentifikasi sebab-sebab timbulnya konflik dan beberapa faktor terkait, kedua kegiatan tersebut menghasilkan *Modul Pelatihan Resolusi Konflik Komunal*. Modul tersebut dibuat untuk dipergunakan sebagai buku panduan dalam pelatihan resolusi konflik dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) masyarakat dalam memahami dan menyikapi konflik kekerasan yang tengah berlangsung dan suatu ketika mungkin saja terjadi di lingkungan mereka.

Concern Pusat Bahasa dan Budaya yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini membuat kami menanggapi secara positif ajakan pihak European Centre for Conflict Prevention (ECCP) untuk menerjemahkan beberapa makalah dalam *Searching for Peace in Asia Pacific (2003)*, terutama yang berkaitan dengan kekerasan komunal di Indonesia, Timor Timur, Filipina dan Papua New Guinea ke dalam Bahasa Indonesia. Bagi kami penerjemahan buku ini penting artinya mengingat di dalamnya dipaparkan secara gamblang akar-akar konflik, sifat dan pola konflik, serta bagaimana cara penanggulangannya. Kisah-kisah kegagalan dan kesuksesan dalam

penciptaan perdamaian dan pencegahan konflik juga diketengahkan secara jelas dengan maksud agar para pembaca dapat mengambil pelajaran. Peran pemerintah dan masyarakat sipil juga disingkap untuk melihat secara kritis peran kedua belah pihak.

Akhirnya, atas nama Pusat Bahasa dan Budaya, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan diterjemahkan dan diterbitkannya buku *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor Timur, Filipina dan Papua New Guinea*. Secara khusus, kami haturkan ucapan terima kasih kepada pihak European Centre for Conflict Prevention (ECCP) yang memberi kepercayaan kepada kami serta mensponsori penerjemahan buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Lynne Rienner Publishers—yang mengizinkan penerbitan buku ini—para Editor dan Koordinator Proyek serta semua pihak yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu per satu disini, yang telah bekerja secara sungguh-sungguh untuk memungkinkan tulisan-tulisan dalam buku ini dibaca oleh banyak orang yang menghendaki dunia yang aman, damai dan harmonis. Semoga buku ini memberi manfaat seluas-luasnya bagi pembaca yang budiman.

Direktur,
Pusat Bahasa dan Budaya
(Center for Languages and Cultures)

H. Murni Djamal

Pendahuluan

Buku ini memuat hasil riset tentang dinamika masyarakat sipil meretas jalan perdamaian di Indonesia, Timor Timur, Filipina serta Papua New Guinea. Penerbitan buku ini bertujuan memfasilitasi pertukaran informasi mengenai upaya-upaya resolusi konflik dan penciptaan perdamaian yang selama ini telah berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Pasifik. Pertukaran informasi antar organisasi berguna untuk mendorong terjadinya kerjasama dan sinergi. Pada gilirannya dapat membuka peluang untuk pengembangan strategi-strategi dan pendekatan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan konflik di masa depan.

Tulisan-tulisan dalam buku ini secara umum berusaha memaparkan peran organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam menanggulangi konflik kekerasan yang berlangsung selama periode transisi politik di empat negara tersebut. Untuk melengkapi informasi tersebut buku ini juga memuat direktori profil lembaga-lembaga yang aktif dalam proses penciptaan perdamaian di wilayah-wilayah yang dilanda konflik. Tulisan-tulisan yang tersedia bagaimanapun mencerminkan pandangan para penulis tentang hakikat konflik serta dinamika penanggulangan konflik di wilayah-wilayah penelitian. Para penulis tidak hanya memaparkan sumber-sumber penyebab konflik, dinamika konflik, inisiatif-inisiatif dan diplomasi yang ditempuh selama penanggulangan konflik, tapi juga menilai prospek, dan atas

dasar itu semua mengajukan rekomendasi bagi penyelesaian konflik yang menyeluruh dan fundamental.

Buku ini memuat delapan tulisan. Lima diantaranya menyoroti penanggulangan konflik-konflik yang berlatar struktural di Aceh, Papua Barat, Timor-Timur, Mindanao, dan Bougainville. Aguswandi menyoroti absennya peran masyarakat sipil dalam penciptaan perdamaian di Aceh; Yohanis G. Bonay dan Jane McGrory menekankan pentingnya semua pihak terkait memahami akar-akar konflik di Papua Barat guna mencapai suatu penyelesaian konflik yang hakiki; Helder Da Costa memaparkan peranan masyarakat sipil dalam mengupayakan sebuah transisi politik yang damai di Timor-Timur terutama paska kemerdekaan; Rufa Cagoco-Guiam menganalisis dinamika masyarakat sipil di Mindanao dalam upaya mereka mempengaruhi masyarakat umum, pemerintah Filipina dan pihak MILF (Moro Islamic Liberation Front) untuk mendukung upaya-upaya perdamaian yang berkelanjutan; dan Volker Böge dan Lorraine Garasu memotret bagaimana organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berbasis di gereja, organisasi perempuan, dan masyarakat adat di Bougainville sukses mendorong suatu penyelesaian politik yang menyeluruh antara pihak-pihak yang bertikai: Tentara Revolusioner Bougainville (BRA), yang menuntut pemisahan diri dari PNG, dan Pasukan Perlawanan yang mendukung pemerintah PNG.

Tiga tulisan yang lain memuat analisis tentang konflik komunal dan upaya-upaya penanggulangannya di Indonesia. Harold Crouch meninjau secara umum tentang situasi transisi politik di Indonesia paska kejatuhan rejim Soeharto dan pecahnya konflik komunal di beberapa wilayah di tanah air. Dua tulisan lain adalah tentang penciptaan perdamaian konflik bernuansa agama di Maluku dan konflik bernuansa etnik di Kalimantan. Samsu Rizal Panggabean menyoroti serangkaian tantangan yang harus dihadapi bagi penciptaan perdamaian di Maluku. Meskipun telah dicapainya Deklarasi Malino, menurut penulis perdamaian hakiki di Maluku masih dihadapkan pada berbagai masalah fundamental: tidak jelasnya program hunian bagi pengungsi, rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dan keamanan, masih tingginya tingkat kecurigaan antara komunitas

yang bertikai, serta belum terbangunnya integrasi yang kukuh antara masyarakat sipil dan aparat pemerintah. John Bamba dalam kasus Kalimantan melihat bahwa aktifitas-aktifitas organisasi masyarakat sipil di daerah ini baru menekankan upaya-upaya peredaaan konflik dan rehabilitasi korban konflik kekerasan. Belum tampak agenda masyarakat sipil untuk mempromosikan inisiatif-inisiatif penciptaan perdamaian dan rekonsiliasi jangka panjang antara suku-suku yang bertikai: Madura, Melayu dan Dayak.

Penciptaan perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah konflik menuntut keterlibatan aktif dan kerjasama sinergis semua pihak baik aparat pemerintahan maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil. Dalam suasana global yang mengarah kepada agenda-agenda demokratisasi politik dan penguatan masyarakat sipil, tidak ada jalan lain bagi pemerintah kecuali memberikan ruang yang terbuka bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk ikut menentukan arah bagi penanggulangan konflik dan penciptaan perdamaian. Kritisisme dari organisasi-organisasi tersebut seyogyanya disambut sebagai “jamu pahit” yang menyetatkan ketimbang ancaman yang harus diberangus. Di pihak lain, organisasi-organisasi masyarakat sipil juga dituntut untuk lebih berbenah diri guna meningkatkan kapasitas dan integritasnya di mata publik. Buku ini juga menyiratkan pesan penting bahwa aktivitas-aktivitas penciptaan perdamaian perlu lebih banyak lagi melibatkan partisipasi perempuan dan wakil-wakil adat disamping organisasi-organisasi berbasis keagamaan.

Jakarta, 1 Desember 2004
Editor

Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim

